

**ANALYSIS FACTORS - FACTORS AFFECTING DOMINANT BUDGET ABSORPTION
(STUDY AT THE DEPARTMENT OF REVENUE, FINANCE AND ASSET
MANAGEMENT KARAWANG DISTRICT)**

Liya Megawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang 41361
liyamegawati67@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of variable cash planning, budget execution, procurement, and monitoring and evaluation of budget absorption in the Department of Revenue, Finance and Asset Management Karawang District.

The methodology used in this study using a quantitative approach to answer the type of explanatory hypotheses, with data analysis techniques using multiple linear regression statistical tests.

The results obtained in which there is significant influence between the variables of variable absorption cash planning with a budget of 1.275, then the variable implementation of the budget with variable absorption significant influence amounted to 0,147, then the variable procurement of goods and services with variable absorption significant influence amounted to 0,160, as well as monitoring and evaluation variables with variable absorption significant influence amounted to 0,527. The effect of variable cash planning, budget execution, procurement, and monitoring and evaluation of significant absorption with a coefficient of determination of 70.3%. this means that the three independent variables together have an influence on the dependent variable and 29.7% influenced by other variables.

Keywords : Cash Planning, Budget Implementation, Procurement, Monitoring and Evaluation, Budget Absorption

PENDAHULUAN

Sebagai langkah awal siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setiap tahun menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menyampaikan kepada pihak DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mendapat persetujuan maka akan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dijadikan sebagai dasar penyelenggara pemerintah selama satu tahun kedepan, pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran tersebut.

Lambatnya penyerapan anggaran tentu akan mempengaruhi pelaksanaan program pemerintah, misalnya kebijakan fungsi APBD dalam melaksanakan fungsi alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi (*pro-growt*), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (*pro-job*), mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), dan pembangunan yang berwawasan lingkungan (*pro-environment*).

Usaha – usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran dari tahun ke tahun hasilnya masih belum memuaskan. Hal ini terlihat dari tidak proposionalnya pola penyerapan anggaran belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang tahun 2010 – 2014. Pola penyerapan anggaran belanja tahun 2010 – 2014 tidak proposional, yaitu penyerapan rendah diawal tahun dan sangat tinggi diakhir tahun padahal perencanaan penarikan dana dari satker/pengguna cenderung proposional, yaitu membuat rencana penarikan dana bulanan terbagi kedalam 12 bagian dari dana yang dimiliki. Pada gambar 1.1 antara tahun 2010 – 2014 penyerapan anggaran belanja triwulan IV memiliki proporsi yang besar

yaitu sebesar 72,81%, 69,34%, 71,12%, 72,03%, dan 82,78%. Penumpukan pembayaran di triwulan IV mencerminkan penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keterlambatan penyerapan anggaran perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran antara lain proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga faktor-faktor internal dari pengguna anggaran. Pemerintah telah berupaya untuk mempercepat proses penyerapan anggaran antara lain dengan perbaikan kelembagaan, perbaikan bisnis proses, penataan sumber daya manusia (SDM) hingga perbaikan penghasilan/remunerasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama yang berhubungan dengan proses penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang”.

KAJIAN TEORI

Manajemen Keuangan

Menurut James C. Van Horne(2002:8) bahwa *financial management endeavors to make optimal investment, financing and dividend/share repurchase decisions*. Sedangkan pendapat Melicher, Welshans dan Norton(1996) bahwa *financial management studies how a business should manage its assets, liabilities and equity to produce a goods or service*. Bambang Riyanto, (2008) mendefinisikan manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut.

Prinsip manajemen perusahaan menuntut agar baik dalam memperoleh maupun menggunakan dana harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian manajemen keuangan adalah manajemen untuk fungsi-fungsi pembelanjaan. Dalam pengertian manajemen terkandung fungsi-fungsi perencanaan, pengarahan dan pengendalian. Berhubungan dengan itu maka perlu ada perencanaan dan pengendalian baik dalam menggunakan maupun dalam pemenuhan kebutuhan dana.

Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (Halim 2008) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasi atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini Bastian(2001) dalam Moito (2010) menyatakan persektif kedepan dari sistem keuangan daerah adalah mewujudkan sistem perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Halim (2008: 25) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah.

Pengertian Anggaran

Menurut Hilton (2008) anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Menurut Hansen dan Mowen (2004:1), setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang saling berhubungan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya.

Anggaran digunakan sebagai pedoman kerja sehingga proses penyusunannya memerlukan organisasi anggaran yang baik, pendekatan yang tepat, serta model-model perhitungan besaran (simulasi) anggaran yang mampu meningkatkan kinerja pada seluruh jajaran manajemen dalam organisasi. Proses penyusunan anggaran, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu *topdown*, *bottom up* dan partisipasi (Ramadhani dan Nasution, 2009).

Pengertian Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009) menjelaskan mengenai definisi anggaran sector public yaitu berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran public merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Perencanaan Kas

Hartley (2001) menyatakan sebagai berikut : *A forecast in no more than someone's belief in the future based upon certain assumptions that have been made regarding future events. If the assumptions subsequently prove to be wrong, then the forecast will not prove to be right either. For this reason, it is necessary to set down formally the key assumptions on which major parts of the forecast are based.* Dalam konteks manajemen kas, tujuan utama dari perencanaan adalah untuk memberikan pedoman yang cukup dan tepat waktu dalam rangka menentukan tindakan untuk mencapai pengendalian yang baik atas arus kas organisasi. Dijelaskan lebih lanjut peran perencanaan dalam proses anggaran, perencanaan harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses anggaran organisasi secara keseluruhan. Tanpa adanya anggaran kas, seorang manajer tidak dapat merencanakan secara efektif kebutuhan kas dan investasi yang optimal. Tindakan yang menyebabkan pergerakan kas adalah arus piutang dan pengeluaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai peran penting dalam perencanaan kas, menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Dalam Negeri pasal 2 Nomor 13 Tahun 2006 tentang ruang lingkup perencanaan kas adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan daerah, yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan daerah, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
 - b. Penerimaan pembiayaan, daerah, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran daerah, yang terdiri dari :
 - a. Belanja daerah, merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
 - b. Pengeluaran pembiayaan, merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis.

Dalam pelaksanaan anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab atas penyusunan kegiatan dan perhitungan biaya yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kewenangan dan tanggungjawab tersebut dilimpahkan kepada kepala satker pusat/unit pelaksana teknis/satker khusus/satker non vertical tertentu/satker sementara, dan selaku kuasa pengguna anggaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut menyusun dokumen pelaksanaan anggaran mengacu kepada rencana kerja dan anggaran (RKA) dan peraturan menteri dalam negeri tentang rincian APBD. Hasil penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disebut konsep DPA yang memuat uraian sasaran yang akan dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana setiap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang diperkirakan.

Pengadaan Barang Dan Jasa

Dalam Perpres 70 tahun 2012 disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Intitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Barang/Jasa sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Barang/Jasa Publik, yaitu barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, baik secara berkelompok maupun secara umum.
- b. Barang/Jasa Privat, merupakan barang yang hanya digunakan untuk individu atau kelompok tertentu.

Berdasarkan penggolongan tersebut maka suatu barang /jasa dapat saja dikategorikan atas barang publik tapi dapat juga dikategorikan atas barang privat tergantung pada penggunaannya. Pada prinsipnya pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa secara transparan, efektif, efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.

MONEV (Monitoring dan Evaluasi)

Monev adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Perbedaan monitoring dan evaluasi adalah monitoring dilakukan pada saat program masih berjalan sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik sewaktu program itu masih berjalan ataupun program itu sudah selesai. Atau dapat juga bila dilihat dari pelakunya, monitoring biasanya dilakukan oleh pihak internal sedangkan evaluasi dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu program beserta dampaknya, sedangkan monitoring hanya melihat keterlaksanaan program, faktor pendukung, penghambatnya. Bila dilihat secara keseluruhan, kegiatan monitoring dan evaluasi ditujukan untuk pembinaan suatu program (Moerdiyanto, 2012).

Pada pelaksanaannya, monev haruslah dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti berikut ini :

- a. Berorientasi pada tujuan. Monev hendaknya dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai.
- b. Mengacu pada kriteria keberhasilan. Monev seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

- c. Mengacu pada asas manfaat. Monev seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas.
- d. dilakukan secara obyektif. Petugas monev harus bersifat independen dan melaporkan temuannya apa adanya (Moerdiyanto, 2012).

Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi *idle money* (Kuncoro, 2013).

Jenis – jenis belanja Menurut Nurlan Darise (2009) untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja pada setiap SKPD diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu :

1. Belanja Langsung, adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan
2. Belanja Tidak Langsung, adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey*, yang berupaya menganalisis pengaruh yang terjadi antara variabel Perencanaan Kas (X_1), variabel Pelaksanaan Anggaran (X_2), variabel Pengadaan Barang dan Jasa (X_3), dan variabel Monitoring dan Evaluasi (X_4), dengan variabel Penyerapan Anggaran (Y).

Batasan Operasional

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel tidak bebas (*dependent variable*).

Operasionalisasi variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel-variabel penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab variabel lain, yang selanjutnya disebut variabel X. pada penelitian ini variabel bebasnya adalah perencanaan kas (X_1), pelaksanaan anggaran (X_2), pengadaan barang dan jasa (X_3), serta monitoring dan evaluasi (X_4)
2. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas, selanjutnya disebut variabel Y. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah penyerapan anggaran (Y).

Sumber dan Cara Penentuan Data dan Informasi

Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu kuisisioner yang dibagikan kepada pegawai di DPPKAD Kabupaten Karawang dan data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan perencanaan kas, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi,

penyerapan anggaran serta literatur dan referensi yang mendukungnya. Data sekunder tersebut digunakan untuk mendukung data primer (*annual report*) Periode 2010-2014.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik komunikasi langsung yaitu dengan observasi langsung serta wawancara dan teknik komunikasi tidak langsung yaitu dengan membagikan kuisioner yang dikuantifikasikan dengan menggunakan Skala Likert dengan 5 (lima) kategori jawaban untuk setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden. Selain itu dilakukan pula studi kepustakaan sebagai landasan teori guna mendukung dan sebagai pembanding dengan data yang diperoleh dari penelitian. Teori-teori tersebut dikumpulkan dari *text book*, jurnal dan referensi ilmiah lainnya.

Analisis Deskriptif

Data primer hasil penelitian akan dianalisis dari setiap item kuisioner tersebut yang memiliki lima jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda berdasarkan Skala Likert dengan skala terendah 1 (satu) dan skala tertinggi 5 (lima), dengan sampel sebanyak 45 orang dengan status PNS pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang.

Formulasi rentang skala :

$$RS = \frac{n(m - 1)}{m}$$

Keterangan :

- RS = Rentang Skala
- n = Jumlah sampel (n)
- m = Jumlah Alternatif jawaban (skor)

Nilai tertinggi yaitu $45 \times 5 = 225$

Nilai terendah yaitu $45 \times 1 = 45$

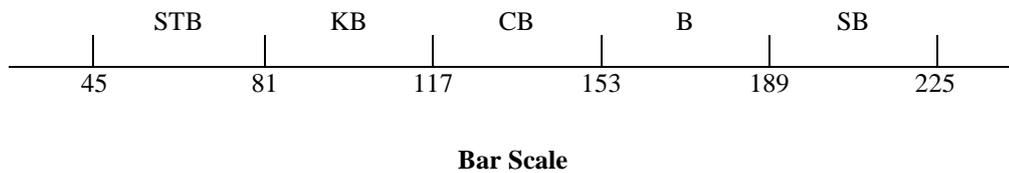
Rentangskala=

$$RS = \frac{45(5 - 1)}{5} = 36$$

Tabel 3.1
Rentang Skala

Skala Skor	Rentang Skala	Kriteria				
		Perencanaan Kas	Pelaksanaan Anggaran	Pengadaan Barang dan Jasa	Monitoring dan Evaluasi	Penyerapan Anggaran
1	45 – 81	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	82 – 117	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	118 – 153	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
4	154 – 189	Tidak Baik	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik
5	190 – 225	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik

Berdasarkan rentang skala dituangkan dalam bar scale sebagai berikut :



Analisis Korelasi

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis korelasi produk moment (*correlation product moment*) adalah salah satu pendekatan untuk mengetahui keeratan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dengan rumus:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana :

- r = Koefisien korelasi
- n = Jumlah sampel
- X = Variabel independent
- Y = Variabel dependent

Sumber : Sugiyono (2005:212)

Model Regresi Linier Berganda

Model regresi berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut :

- Y = Penyerapan Anggaran
- b₀ = Intercept (konstanta)
- X₁ = Perencanaan Kas
- X₂ = Pelaksanaan Anggaran
- X₃ = Pengadaan Barang dan Jasa
- X₄ = Monitoring dan Evaluasi
- b₁, b₂, b₃, b₄ : koefisien regresi variabel X₁, X₂, X₃, X₄

Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji pada pengujian secara simultan ini adalah :

H₀ : β₁ = β₂ = β₃ = 0 ; tidak terdapat pengaruh simultan dari variabel perencanaan kas, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran.

H_a : sekurang-kurangnya β_i ≠ 0 ; i = 1,2 dan 3 ; terdapat pengaruh secara simultan dari variabel perencanaan kas, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Perencanaan Kas

Penyerapan anggaran yang terjadi di DPPKD Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh perencanaan kas dengan dimensi yaitu penerimaan dan pengeluaran.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Variabel Perencanaan Kas

Variabel	Dimensi	No. Pernyataan	Skor	Kriteria
Perencanaan Kas	Penerimaan	X1-1	149	cukup setuju
		X1-2	160	setuju
		X1-3	168	setuju
	Pengeluaran	X1-4	171	setuju
		X1-5	184	setuju
		X1-6	163	setuju
Rata-rata Skor			165.83	setuju

Berdasarkan tabel diatas mengenai rekapitulasi variabel perencanaan kas (X_1), diperoleh rata-rata skor sebesar 165,83. Hal ini jika dilihat dengan kriteria dalam rentang skala pada sampel responden menunjukkan bahwa perencanaan kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang berada pada kriteria setuju.

Pelaksanaan Anggaran

Penyerapan anggaran yang terjadi di DPPKD Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran dengan dimensi yaitu tugas dan wewenang.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Variabel Pelaksanaan Anggaran

Variabel	Dimensi	No. Pernyataan	Skor	Kriteria
Pelaksanaan Anggaran	Tugas	X2-1	149	cukup setuju
		X2-2	160	setuju
		X2-3	168	setuju
		X2-4	171	setuju
		X2-5	184	setuju
		X2-6	163	setuju
		X2-7	163	setuju
		X2-8	159	setuju
	Wewenang	X2-9	170	setuju
		X2-10	163	setuju
		X2-11	161	setuju
Rata-rata Skor			164.64	setuju

Berdasarkan tabel diatas mengenai rekapitulasi variabel pelaksanaan anggaran (X_2), diperoleh rata-rata skor sebesar 164,64. Hal ini jika dilihat dengan kriteria dalam rentang skala pada sampel responden menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang berada pada kriteria setuju.

Pengadaan Barang dan Jasa

Penyerapan anggaran yang terjadi di DPPKD Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh pengadaan barang dan jasa dengan dimensi yaitu tugas dan wewenang.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Variabel Pengadaan Barang dan Jasa

Variabel	Dimensi	No. Pernyataan	Skor	Kriteria
Pengadaan Barang dan Jasa	Tugas	X3-1	149	cukup setuju
		X2-2	160	Setuju
		X2-3	168	Setuju
		X2-4	171	Setuju
		X2-5	184	Setuju
		X2-6	163	Setuju
		X2-7	185	Setuju
		X2-8	169	Setuju
	Wewenang	X3-9	186	Setuju
		X3-10	175	Setuju
		X3-11	168	Setuju
		X3-12	176	Setuju
Rata-rata Skor			171.17	Setuju

Berdasarkan tabel diatas mengenai rekapitulasi variabel pengadaan barang dan jasa (X_3), diperoleh rata-rata skor sebesar 171,17. Hal ini jika dilihat dengan kriteria dalam rentang skala pada sampel responden menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang berada pada kriteria setuju.

Monitoring dan Evaluasi

Penyerapan anggaran yang terjadi di DPPKD Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran dengan dimensi yaitu penyusunan RKPD, pengendalian dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Variabel Monitoring dan Evaluasi

Variabel	Dimensi	No. Pernyataan	Skor	Kriteria
Monitoring dan Evaluasi	Penyusunan RKPD	X4-1	149	cukup setuju
		X4-2	160	Setuju

Tabel 4.4
Rekapitulasi Variabel Monitoring dan Evaluasi (Lanjutan)

		X4-3	171	Setuju
	Pengendalian dan Evaluasi	X4-4	184	Setuju
		X4-5	163	Setuju
		X4-6	175	Setuju
		Pembinaan dan Pengawasan	X4-7	187
Rata-rata Skor			169.86	Setuju

Berdasarkan tabel diatas mengenai rekapitulasi variabel monitoring dan evaluasi (X₄), diperoleh rata-rata skor sebesar 169,86. Hal ini jika dilihat dengan kriteria dalam rentang skala pada sampel responden menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang berada pada kriteria setuju.

Penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran yang terjadi di DPPKD Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh pelaksanaan anggaran dengan dimensi yaitu penyusunan RKPD, pengendalian dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Variabel Penyerapan Anggaran

Variabel	Dimensi	No. Pernyataan	Skor	Kriteria
Penyerapan Anggaran	Belanja Langsung	Y1	149	cukup setuju
		Y2	160	setuju
		Y3	168	setuju
	Belanja Tidak Langsung	Y4	171	setuju
		Y5	184	setuju
		Y6	163	setuju
		Y7	185	setuju
		Y8	174	setuju
		Y9	187	setuju
		Y10	177	setuju
Rata-rata Skor			171.80	setuju

Berdasarkan tabel diatas mengenai rekapitulasi variabel penyerapan anggaran (Y), diperoleh rata-rata skor sebesar 171,80. Hal ini jika dilihat dengan kriteria dalam rentang skala pada sampel responden menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang berada pada kriteria setuju.

Analisis Korelasi

Dalam penelitian ini, analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara perencanaan kas, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran secara simultan.

Tabel 4.7
Koefisien Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854	.730	.703	2.60351

a. Predictors: (Constant), Monitoring dan Evaluasi (X4), Pengadaan Barang dan Jasa (X3), Pelaksanaan Anggaran (X2), Perencanaan Kas (X4)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai koefisien korelasi berganda R sebesar 0,854. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara keempat variabel bebas secara simultan dengan variabel terikat tergolong kedalam hubungan yang sangat kuat (0,80 – 1,0). Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat hubungan yang sangat kuat antara perencanaan kas, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang.

Uji Hipotesis

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS for Windows* versi 17.0. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya diringkas sebagai berikut;

Tabel 4.8
Pengujian Hipotesis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.039	3.189		4.402	.000
	Perencanaan Kas	1.548	.281	1.275	5.510	.000
	Pelaksanaan Anggaran	.149	.123	.147	1.217	.000
	Pengadaan Barang dan Jasa	.143	.112	.160	1.286	.000
	Monitoring dan Evaluasi	.637	.234	.527	2.721	.010

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel model regresi diatas didapat nilai $b_0 = 14,039$ koefisien regresi b_1 sebesar 1,548, b_2 sebesar 0,149, b_3 sebesar 0,143 dan b_4 sebesar 0,637. Sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 14,039 + 1,548X_1 + 0,149X_2 + 0,143X_3 + 0,637X_4 + e$$

Pada persamaan regresi diatas, dapat dilihat koefisien regresi dari keempat variabel independen bertanda positif yang menunjukkan bahwa perencanaan kas, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta monitoring dan evaluasi yang baik akan meningkatkan penyerapan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh perencanaan kas, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel perencanaan kas berada pada skala baik. Artinya berdasarkan persepsi dari responden menyatakan setuju dengan perencanaan kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang. Hal ini didasarkan pada dimensi dan indikator yang telah ditetapkan pada penelitian ini dengan mengacu pada hasil nilai rata - rata memperoleh skor 165,83.
2. Variabel pelaksanaan anggaran berada pada skala baik. Artinya berdasarkan persepsi dari responden menyatakan setuju dengan pelaksanaan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang. Hal ini didasarkan pada dimensi dan indikator yang telah ditetapkan pada penelitian ini dengan mengacu pada hasil nilai rata – rata memperoleh skor 164,64.
3. Variabel pengadaan barang dan jasa berada pada skala baik. Artinya berdasarkan persepsi dari responden menyatakan setuju dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang. Hal ini didasarkan pada dimensi dan indikator yang telah ditetapkan pada penelitian ini dengan mengacu pada hasil nilai rata – rata memperoleh skor 171,17.
4. Variabel monitoring dan evaluasi berada pada skala baik. Artinya berdasarkan persepsi dari responden menyatakan setuju dengan monitoring dan evaluasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang. Hal ini didasarkan pada dimensi dan indikator yang telah ditetapkan pada penelitian ini dengan mengacu pada hasil nilai rata – rata memperoleh skor 169,86.
5. Variabel penyerapan anggaran berada pada skala baik. Artinya berdasarkan persepsi dari responden menyatakan setuju dengan penyerapan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang. Hal ini didasarkan pada dimensi dan indikator yang telah ditetapkan pada penelitian ini dengan mengacu pada hasil nilai rata – rata memperoleh skor 177,29
6. Variabel perencanaan kas, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta monitoring dan evaluasi berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan anggaran dengan koefisien determinasi sebesar 0,703 atau 70,3%. Hal ini menunjukkan terdapat variabel lain yang tidak diteliti yang mempengaruhi penyerapan anggaran sebesar 29,7%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta : BPFE
- Darise, Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, Jakarta: Penerbit PT Indeks
- Ghulam, Rhumy. 2013. *Agency Theory dalam sektor publik di Indonesia*.
- Halim, Abdul, 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hansen, Don R. dan Mowen, Marryane M. 2004. *Akuntansi Manajemen*, Edisi tujuh. Jakarta : Salemba Empat
- Haryadi S & Winda J. (2011). *SPSS & LISREL, Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*. Jakarta : Salemba Empat
- Mahmud, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Ofset.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer
- Singarimbun Masri, Sofian Efendi, (1995). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES
- Sugiyono, 2010. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono.2009.*Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung :Alfabeta

Peraturan dan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.01/2012. Tentang pelimpahan Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2012. Kementerian Keuangan Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012. Tentang perubahan atas peraturan presiden no 54 tahun 2010. Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 27 Tahun 2014. Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- Permendagri Nomor 99 Tahun 2014. Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dilingkungan Departemen Dalam Negeri

Tesis dan Jurnal

- Hamid, Rizky. 2011. *Pengaruh system perencanaan anggaran, sistem informasi, keuangan daerah, dan system pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah terhadap kemampuan daya serap anggaran di pemerintahan kota DKI Jakarta.*
- Herryanto, Hendris. 2012. *Faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta.*
- Miliasih, Retno. 2012. *Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian Negara/ lembaga ta 2010 di wilayah pembayaran kppn Pekanbaru.*
- Prasetyo, Adi Priatno. 2013. *Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.*
- Simanjuntak, Johny. 2013. *Analisis pengaruh pendapatan dan anggaran belanja Negara terhadap realisasi anggaran periode tahun 2006 – 2011 pada KKPN Sidakalang.*
- Solihin, Dadang. 2008. *Penyusunan monitoring dan evaluasi pembangunan.*
- Moerdiyanto. 2009. *Teknik monitoring dan evaluasi dalam rangka memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan manajemen.*
- Siswanto, Adrianus Dwi dan Rahayu, Sri Lestari. 2010. *Faktor – faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja Kementerian/Lembaga TA 2010.*